

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengkaji kemajuan ekonomi pada suatu daerah. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana perekonomian lokal berjalan dengan baik. Pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi akan meningkat sebagai hasil dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan dari faktor-faktor tersebut (Yulianita, 2005). Namun, dalam konteks pembangunan regional, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan secara merata di seluruh wilayah. Perbedaan potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, tingkat infrastruktur, serta kebijakan pembangunan antar daerah seringkali menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi (Puspita *et al.*, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tertinggi kedua terletak di Provinsi Jawa Timur setelah DKI Jakarta yang menduduki angka tertinggi kesatu dalam 15 tahun terakhir yakni periode tahun 2010-2024. Fenomena ini menarik karena meskipun PDRB ADHK meningkat, distribusi pertumbuhan tidak merata antar kabupaten/kota, sehingga perlu dianalisis apakah terjadi konvergensi sigma dan konvergensi beta, pada beta absolut ataupun beta kondisional di tingkat regional.

**Tabel 1.1 Data Jumlah PDRB ADHK Menurut 5 Provinsi Tertinggi Indonesia
2020-2024**

PROVINSI	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	1.792.291.09	1.856.000.70	1.953.488.99	2.050.472.97	2.151.041.33
Jawa Timur	1.611.392.55	1.668.754.36	1.757.874.90	1.844.808.68	1.935.810.15
Jawa Barat	1.453.380.72	1.507.746.39	1.589.984.93	1.669.421.49	1.752.071.20
Jawa Tengah	965.227.27	997.321.13	1.050.278.90	1.102.473.58	1.157.025.94
Sumatera Utara	533.746.36	547.651.82	573.528.77	602.235.95	632.534.73

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa lima provinsi dengan PDRB tertinggi di Indonesia mengalami peningkatan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2024. DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan PDRB terbesar, disusul oleh Jawa Timur yang konsisten berada di posisi kedua dengan kenaikan PDRB setiap tahun. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara juga mengalami pertumbuhan, meskipun nilainya lebih kecil dibanding dua provinsi teratas. Pola ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional berjalan positif, tetapi kesenjangan antarprovinsi masih terlihat jelas karena selisih PDRB antarwilayah cukup besar. Dalam konteks penelitian ini, posisi Jawa Timur yang terus tumbuh tetapi tetap memiliki perbedaan kondisi ekonomi antar kabupaten/kota menjadi alasan penting untuk mengkaji apakah terjadi konvergensi atau ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi di dalam provinsi tersebut.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional memiliki peran strategis dengan kontribusi ekonomi yang besar, meskipun distribusi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Timur masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Studi oleh Hadi Priyono *et al.* (2024) menunjukkan adanya disparitas antar wilayah di Jawa Timur dan bahwa faktor pendidikan, investasi, dan pengangguran terbuka menjadi penentu disparitas tersebut. Beberapa daerah, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, berada dalam kategori daerah maju dan tumbuh cepat (Aditya Pratama *et al.*, 2025). Sebaliknya, daerah yang lebih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat; sementara itu, analisis empiris di kawasan Surabaya Raya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan daerah (PAD) dan alokasi dana lokal, mendukung kesenjangan antar wilayah (Novita Dwi Indriyani, 2021).

Dalam penelitian konvergensi ekonomi, pemilihan wilayah penelitian menjadi aspek penting karena berkaitan dengan keragaman karakteristik antar daerah yang diamati. Semakin banyak unit wilayah yang dianalisis, semakin besar variasi kondisi ekonomi, sosial, dan demografi yang dapat digunakan untuk menguji apakah terjadi proses penyempitan kesenjangan ekonomi. Dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota yang relatif lebih banyak sehingga memberikan cakupan analisis yang lebih luas dalam mengkaji dinamika konvergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Adapun perbandingan jumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel berikut.

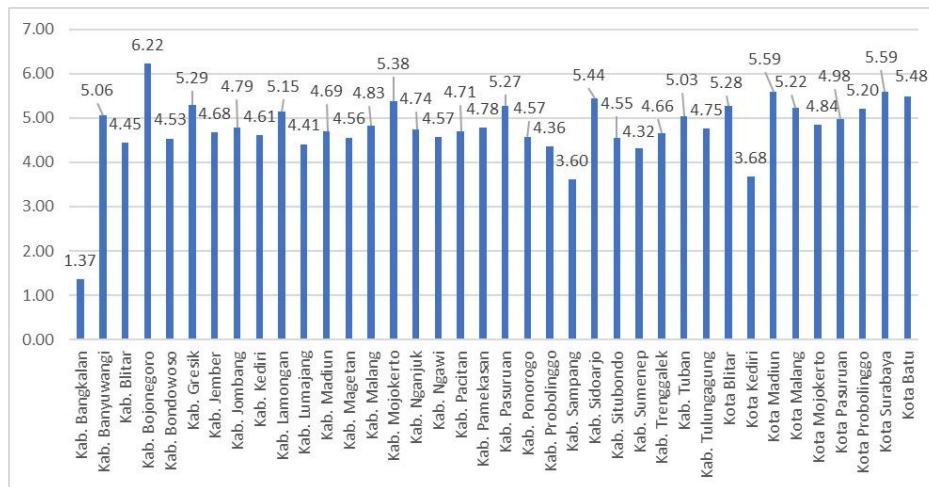
Tabel 1.2 Provinsi-Provinsi Dengan Jumlah Kabupaten/Kota Terbanyak Di Pulau Jawa

Provinsi	Jumlah Kab/Kota
Jawa Timur	38
Jawa Tengah	35
Jawa Barat	27
Banten	8
DKI Jakarta	6
DI Yogyakarta	5

Berdasarkan Tabel 1.2 Provinsi-Provinsi Dengan Jumlah Kabupaten/Kota Terbanyak Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 38 daerah yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/kota dan Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten/kota. Banyaknya jumlah daerah administratif di Jawa Timur menunjukkan tingginya keragaman karakteristik pembangunan antarwilayah, baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, investasi, populasi, maupun ketenagakerjaan. Keragaman karakteristik antarwilayah tersebut menjadi faktor penting dalam kajian konvergensi ekonomi karena perbedaan kondisi awal pembangunan akan

memengaruhi kecepatan masing-masing daerah dalam mencapai tingkat keseimbangan pertumbuhan ekonomi (steady state) (Sodik, 2006). Oleh karena itu, Jawa Timur menjadi wilayah yang relevan untuk menguji hipotesis konvergensi ekonomi, karena proses penyempitan atau pelebaran kesenjangan ekonomi dapat diamati secara lebih komprehensif pada daerah-daerah yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Selain itu, besarnya jumlah kabupaten/kota juga memberikan variasi data yang lebih luas sehingga mampu menghasilkan analisis konvergensi yang lebih representatif dibandingkan wilayah dengan jumlah daerah yang relatif lebih sedikit.

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah merupakan fenomena umum yang sering terjadi dalam proses pembangunan regional. Di Provinsi Jawa Timur, perbedaan laju pertumbuhan PDRB antar kabupaten/kota menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah karena berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat, alokasi investasi, serta arah kebijakan pembangunan wilayah. Berdasarkan temuan Diartho *et al.* (2023), pola ketimpangan ekonomi di Jawa Timur bersifat dinamis, di mana sebagian wilayah mengalami pertumbuhan cepat sementara wilayah lainnya tertinggal. Hal ini diperkuat oleh studi Ramadhan *et al.* (2023) yang menemukan bahwa disparitas PDRB per kapita, ukuran populasi, dan jumlah tenaga kerja berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah daerah-daerah tertinggal mampu melakukan konvergensi menuju wilayah maju atau justru mengalami divergensi dalam pertumbuhan ekonomi regional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

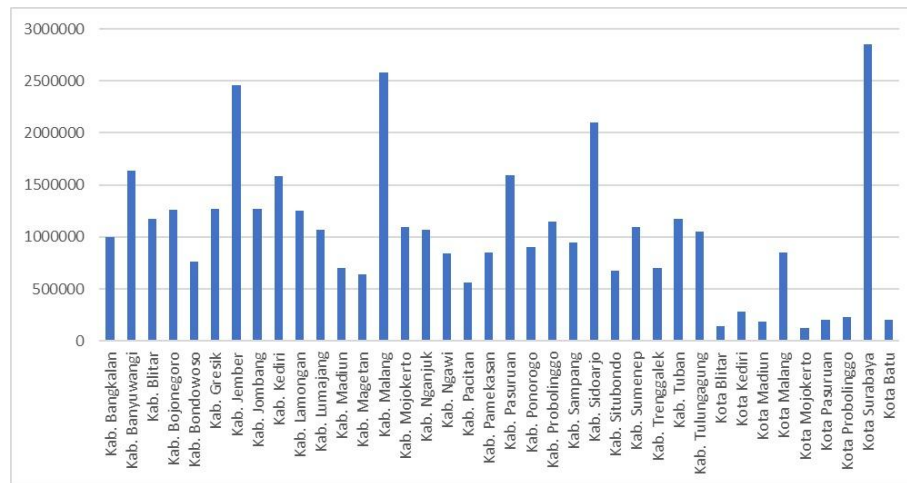
Gambar 1.1 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024

Berdasarkan gambar 1.1 rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2024, terlihat adanya ketimpangan yang cukup mencolok antarwilayah, di mana Kabupaten Bangkalan mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata terendah sebesar 1,37 persen, sedangkan Kabupaten Bojonegoro mencapai 6,22 persen sebagai yang tertinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konvergensi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Timur belum sepenuhnya tercapai, karena daerah dengan infrastruktur, urbanisasi, dan aktivitas industri yang lebih maju seperti kawasan Gerbangkertosusila (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah agraris dan kepulauan seperti Madura (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024) (Firmansyah & Aulia, 2023). Namun demikian, tren peningkatan rata-rata pertumbuhan di sebagian besar daerah mengindikasikan adanya potensi konvergensi jangka panjang, di mana daerah dengan pertumbuhan rendah perlahan mampu mengejar daerah yang lebih maju seiring dengan kebijakan pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas ekonomi antarwilayah (Barro & Sala-i-Martin, 2004).

Penelitian Puspita *et al.*, (2018) mengatakan bahwa Konvergensi ekonomi mengacu pada kondisi di mana daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah dengan pendapatan tinggi, sehingga kesenjangan antarwilayah semakin menyempit. Sebaliknya, jika pertumbuhan daerah maju lebih cepat dibandingkan daerah tertinggal, maka akan terjadi divergensi yang memperlebar ketimpangan.

Dalam kajian ekonomi pembangunan, penelitian mengenai konvergensi pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow, 1956). Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dengan adanya hukum *diminishing return* terhadap modal, wilayah yang memiliki tingkat pendapatan awal rendah justru berpotensi tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang lebih kaya. Hal ini yang kemudian melahirkan konsep hipotesis konvergensi, yaitu kondisi di mana kesenjangan ekonomi antarwilayah akan semakin menyempit dalam jangka panjang. Sebaliknya, apabila pertumbuhan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah maju, maka yang terjadi adalah divergensi yang memperlebar ketimpangan. Konsep ini diperkuat Barro & Sala-i-Martin (1992), yang menunjukkan bahwa konvergensi dapat terjadi apabila terdapat hubungan negatif antara pendapatan awal suatu wilayah dengan laju pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, penggunaan teori pertumbuhan neoklasik sebagai landasan teoritis penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji apakah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2020–2024 mengalami kecenderungan konvergensi atau justru divergensi dalam proses pembangunan ekonominya (Sodik, 2006).

Selain menjelaskan aspek pertumbuhan ekonomi, penting pula untuk memperhatikan faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap dinamika konvergensi ekonomi antarwilayah. Salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas pembangunan suatu daerah adalah populasi penduduk dan investasi. Mengenai populasi penduduk, dalam penelitian Yusa & Gitaharie (2024) ditemukan bahwa walaupun terdapat kecenderungan konvergensi pendapatan per kapita di provinsi-provinsi Indonesia, kecepatan konvergensinya sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya rasio dukungan ekonomi (*economic support ratio*) dan rendahnya akumulasi modal manusia. Dengan demikian, apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh perencanaan yang memadai dalam hal penyerapan tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan, maka potensi *dividend demografi* tidak akan optimal, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses konvergensi ekonomi antarwilayah. Lebih lanjut, studi khusus di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa variabel populasi dan indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) belum terbukti secara signifikan mempercepat konvergensi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tanpa penguatan kualitas manusia dan infrastruktur sosial dapat menjadi beban bagi pembangunan regional (Diartho *et al.*, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

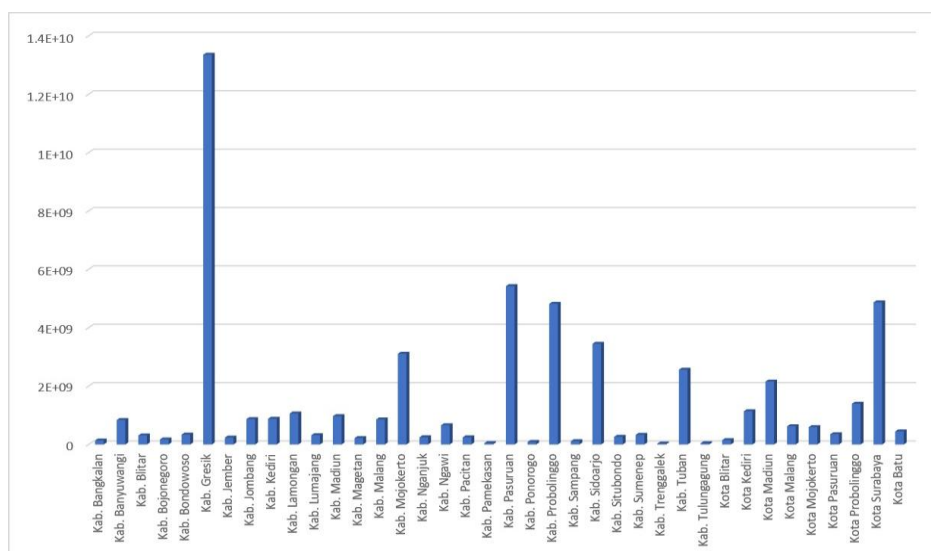
Gambar 1.2 Rata-rata Populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024

Berdasarkan gambar 1.2 Rata-rata Populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024, terlihat adanya ketimpangan distribusi penduduk antarwilayah. Kota Surabaya memiliki rata-rata populasi tertinggi dibandingkan daerah lain, diikuti oleh Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi, industri, perdagangan, dan jasa yang menjadi daya tarik urbanisasi. Sebaliknya, beberapa kota seperti Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Batu memiliki rata-rata populasi yang relatif rendah karena luas wilayah dan kapasitas ekonomi yang lebih terbatas. Ketimpangan distribusi penduduk ini mencerminkan adanya konsentrasi populasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tertentu di Jawa Timur.

Distribusi penduduk yang tidak merata antarwilayah turut menjadi faktor penghambat konvergensi ekonomi. Konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan atau pusat industri dapat menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur, layanan publik, dan pasar tenaga kerja lokal. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan investasi sosial dan fisik yang memadai, maka disparitas

antarwilayah akan semakin melebar. Berdasarkan teori konvergensi pertumbuhan neoklasik dan pendekatan *spatial endogenous*, proses *catch-up* tidak akan terjadi secara otomatis apabila faktor pendukung seperti modal manusia, infrastruktur, dan investasi masih tertinggal (Sodik, 2006). Oleh karena itu, dalam konteks Provinsi Jawa Timur, peningkatan populasi bukan hanya dipandang dari sisi jumlah penduduk, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia serta kemampuan daerah dalam menyediakan kesempatan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan investasi yang memadai agar pertumbuhan demografis dapat mendukung percepatan konvergensi ekonomi antarwilayah.

Investasi juga menjadi salah satu faktor utama yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan proses konvergensi antarwilayah. Investasi dari sektor publik maupun swasta berfungsi sebagai katalis dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas kapasitas produksi suatu daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 1.3 Rata-rata Investasi Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024

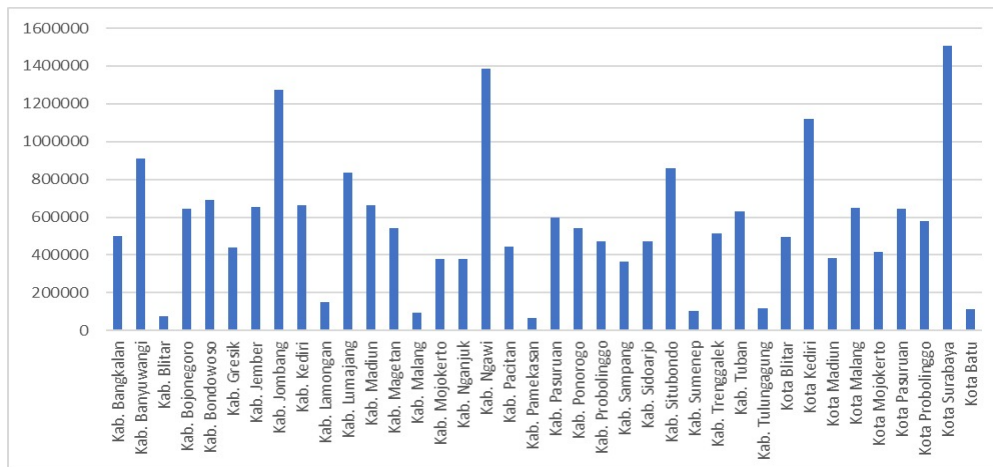
Berdasarkan gambar 1.3 Rata-rata investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024, terlihat bahwa distribusi investasi masih belum

merata antarwilayah. Beberapa daerah seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Surabaya memiliki rata-rata investasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tingginya investasi pada wilayah tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan basis industri, perdagangan, serta infrastruktur yang lebih maju cenderung lebih mampu menarik modal dan mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten/kota lain masih memiliki tingkat investasi relatif rendah sehingga potensi pertumbuhan ekonominya juga lebih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam menciptakan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Daerah yang mampu menarik lebih banyak investasi akan cenderung mengalami peningkatan kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan tingkat investasi rendah. Misalnya, dalam penelitian Verianto & Diwanegara (2023) di wilayah Jawa Timur ditemukan bahwa investasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap proses konvergensi pendapatan regional. Bahkan dalam studi Hidayat *et al.* (2022) pada Pulau Sumatera ditemukan bahwa investasi, termasuk infrastruktur energi, memiliki dampak positif terhadap proses konvergensi antarwilayah melalui pendekatan data panel spasial. Penelitian Imaduddin & Kharisma (2024) terkait wilayah Kalimantan juga menegaskan bahwa variabel investasi asing langsung (FDI), investasi domestik, dan sektor industri secara kondisional mampu mempercepat konvergensi pendapatan antarprovinsi. Dengan demikian, memperkuat investasi daerah bukan sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi daerah dapat menjadi instrumen penting dalam memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, investasi yang efektif harus didukung oleh perencanaan pengelolaan populasi yang baik, meliputi penyerapan tenaga kerja, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur sosial dan fisik yang merata. Jika tidak, pertumbuhan penduduk yang tinggi justru dapat berpotensi menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana diungkap dalam penelitian Yenny & Anwar (2020), karena meningkatnya beban penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan infrastruktur yang tidak diimbangi kapasitas pembangunan daerah.

Selain faktor populasi dan investasi, tenaga kerja juga merupakan variabel penting dalam menentukan dinamika pertumbuhan ekonomi dan konvergensi antarwilayah. Tenaga kerja berperan sebagai penggerak utama aktivitas produksi karena terlibat secara langsung dalam proses penciptaan barang dan jasa. Dalam konteks pembangunan daerah, tenaga kerja tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitasnya yang mencerminkan tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan (Prayitno & Yustie, 2020). Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 1.4 Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024

Berdasarkan gambar 1.4 Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024 menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi tenaga kerja antarwilayah. Kota Surabaya menjadi daerah dengan rata-rata TPAK tertinggi, diikuti beberapa wilayah seperti Kota Kediri dan Kabupaten Jember. Tingginya TPAK di daerah tersebut menunjukkan besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, yang didukung oleh berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan jasa sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, dan Kota Batu memiliki rata-rata TPAK yang relatif lebih rendah. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, dominasi sektor pertanian tradisional, serta adanya perpindahan tenaga kerja ke wilayah yang lebih maju secara ekonomi.

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas. Hal ini sejalan

dengan temuan Artina (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menyerap tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam kerangka konvergensi ekonomi, tenaga kerja memiliki peran strategis sebagai salah satu input utama dalam model pertumbuhan neoklasik. Penelitian Zahra & Muttaqin (2023) menunjukkan bahwa tenaga kerja bersama modal dan sektor basis secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta dapat mempercepat proses konvergensi antarwilayah. Dengan demikian, distribusi tenaga kerja yang merata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam memperkecil kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja tidak hanya berperan sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai determinan penting dalam proses konvergensi ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja yang memadai agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata antarwilayah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terjadi konvergensi sigma pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2024?
2. Apakah terjadi konvergensi beta absolut pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2024?
3. Apakah terjadi konvergensi beta kondisional pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terjadi konvergensi sigma pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2024?
2. Untuk mengetahui apakah terjadi konvergensi beta absolut pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2024?
3. Untuk mengetahui apakah terjadi konvergensi beta kondisional pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2024?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dan konsep konvergensi pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai konvergensi sigma serta konvergensi beta absolut dan kondisional pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kondisi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota serta faktor-faktor yang memengaruhi proses konvergensi, sehingga bermanfaat bagi akademisi dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.